

## **ABSTRAK**

Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana pembunuhan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam Tindak Pidana tertentu khususnya Tindak pidana pembunuhan diperlukannya suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai rekonstruksi tindak pidana, hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana rekonstruksi sebagai upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana studi kasus wilayah hukum polsek banyumanik semarang. Permasalahan yang diangkat yaitu seperti apa pelaksanaan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, apa saja yang diperlukan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, seperti apa kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam bidang rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan melakukan pengumpulan data baik dari data primer maupun data sekunder.

Menurut hasil penelitian penulis, ternyata pelaksanaan dari rekonstruksi diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana telah menyebutkan pelaksanaan rekonstruksi dan apa saja yang diperlukan rekonstruksi, kebijakan hukum pidana mengenai rekonstruksi yaitu Indonesia harus melakukan pembenahan baik pembenahan yang bersifat substansial yaitu pembenahan dari segi peraturan perundang-undangan dengan membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan khusus mengenai badan penyidik di Indonesia.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pembunuhan, Polsek Banyumanik.

## **ABSTRACT**

The number of criminal acts committed by the community, especially the criminal act of murder, made the police officers investigators to conduct investigations. In particular Criminal Acts Murder crime requires the use of evidence or some kind of other guidance commonly referred to as the reconstruction of criminal acts, this makes the author want to know how the reconstruction as an effort to uncover the crime of murder planning case study of Banyumanik Polsek Semarang Law. The issues raised are what is the implementation of the reconstruction in an effort to uncover the crime of premeditated murder, what are the necessary reconstruction in an effort to reveal the crime of premeditated murder, what kind of criminal law policy in Indonesia in the field of reconstruction in an effort to reveal the crime of premeditated murder in the future come.

The method used by the authors in making this thesis is the method of sociological juridical approach, namely by conducting interviews and perform data collection both from primary data and secondary data.

According to the results of the authors' research, the implementation of the reconstruction is regulated in the Attachment to Decree of the Chief of Police. Pol: Skep 1205 / IX / 2000 on the Revision of the Juklak and Juknis Association The Criminal Investigation Process has mentioned the implementation of reconstruction and what the reconstruction needs, the criminal law policy on reconstruction that is Indonesia must make revamping both substantial improvements namely improvements in terms of legislation - an invitation by establishing and drafting specific legislation concerning the investigative body in Indonesia.

**Keywords: Reconstruction, Killing, Banyumanik Polsek.**